

RESILIENSI KAPASITAS ANGGARAN DAERAH: PENGUKURAN PADA KONDISI PANDEMI COVID-19

Ika Kurnia Indriani¹⁾ Anik Cahyowati²⁾ Agus Widodo³⁾

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak

email: ikakurniaindriani@gmail.com, cahyowatianik@gmail.com, widodoagus1986@gmail.com

Abstract

The most significant factor in managing COVID-19 cases is the local budget capacity. The local government will be able to effectively implement strategic programmes during the COVID-19 epidemic while also sustaining regional economic growth, especially to its significant fiscal capacity. The budget capacity assessment attempts to examine the capacity of municipal governments in Indonesia to effectively administer the APBD. The assessment of budget capacity resilience employ a descriptive quantitative methodology involving measures such as budget solvency, financial independence, and service-level solvency. The assessment results indicate that the municipalities of Mataram, Tidore, Batam, and Sabang achieved the greatest budget capacity index. The government with the highest ranking possesses the capacity to effectively manage unprecedented crises like the COVID-19 pandemic. Meanwhile, the municipalities of Bengkulu, Bontang, and Tegal have the lowest budget capacity index.

Keywords: Budget Capacity, Budget Solvency, Financial Independent, Service-Level Solvency, Covid 19.

Abstrak

Faktor penting dalam keberhasilan penanganan kasus COVID-19 adalah kapasitas ketahanan anggaran daerah. Pemerintah daerah akan mampu melaksanakan program-program strategis secara efektif di masa pandemi COVID-19. Sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan kapasitas anggaran yang baik. Penilaian kapasitas anggaran berupaya untuk mengkaji kapasitas pemerintah kota di Indonesia dalam mengelola APBD secara efektif. Penilaian ketahanan kapasitas anggaran menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif yang mencakup indikator solvabilitas anggaran, kemandirian finansial, dan solvabilitas tingkat layanan. Hasil penilaian menunjukkan Kota Mataram, Tidore, Batam, dan Sabang mencapai indeks kapasitas anggaran paling besar. Pemerintah dengan peringkat tertinggi memiliki kapasitas untuk secara efektif menangani krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti pandemi COVID-19. Sedangkan Kota Bengkulu, Bontang, dan Tegal memiliki indeks kapasitas anggaran terendah.

Kata Kunci: Kapasitas Anggaran, Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, Solvabilitas Layanan, Covid 19

PENDAHULUAN

Penilaian resiliensi kapasitas anggaran daerah adalah teknik perhitungan yang menjadi early warning system bagi pemerintah daerah dalam menghadapi kejadian tidak terduga (Ritonga et al., 2019; Barbera et al., 2021). Dalam penelitian ini berfokus kepada tiga indikator kapasitas

anggaran daerah. Tiga indikator keuangan dapat mewakili penilaian kapasitas anggaran khususnya dari sisi kapasitas anggaran daerah jangka pendek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketahanan kapasitas anggaran daerah dimasa pandemi covid 19. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai proyeksi bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi

kejadian tidak terduga yang berdampak kepada perubahan pola kehidupan masyarakat. Kapasitas anggaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kasus covid 19 (Kurnia Indriani, 2021; Indriani, 2022).

Pemerintah daerah dituntut cepat dalam menangani kasus covid 19 di daerahnya, agar persebaran virus dapat terkendali (Susantono et al., 2020; DeWit et al., 2020). Namun, sistem anggaran pemerintah daerah di Indonesia masih ditopang oleh pemerintah pusat. Kapasitas anggaran pemerintah daerah di Indonesia masih sangat tergantung dengan dana perimbangan pemerintah pusat (I. K. et al Indriani, 2022). Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah (I. K. Indriani et al., 2019). Kapasitas anggaran dapat menjadi sebuah parameter bagi pemerintah daerah dalam menghadapi kejadian tidak terduga (I. K. Indriani, 2022b). Semakin tinggi kemampuan pembiayaan daerah maka akan semakin tinggi kapasitas anggaran dalam membiayai pengeluaran daerah (Langton et al., 2021). Pandemi covid 19 menyebabkan tekanan besar terhadap keuangan pemerintah daerah akibat peningkatan belanja dan penurunan pendapatan sehingga berpotensi mengalami krisis keuangan (Blackman et al., 2020). Pandemi covid 19 berpotensi menghadirkan krisis ekonomi yang mengancam seluruh negara di dunia. Kapasitas anggaran daerah yang baik akan membantu negara terhindar dari krisis (de Villiers et al., 2020). Kapasitas anggaran daerah yang baik menjadi sebuah indikator dapat terlaksananya program dan kegiatan dalam mencapai tujuan negara (Kober & Thambar, 2021).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Menggunakan tiga indikator keuangan daerah yaitu solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Penilaian kapasitas anggaran menggunakan teknik indeks dimensi. Perhitungan indeks dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan dengan rata-rata geometri aritmatika dengan menghasilkan nilai maksimum (1) dan minimum (0) (Ritonga, 2015). Teknik analisis indeks akan menghasilkan bobot dan peringkat atas kapasitas anggaran pemerintah daerah. Indeks kapasitas anggaran daerah akan merepresentasikan ketangguhan kapasitas anggaran selama masa tahun pengamatan. Penilaian indeks kapasitas anggaran menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020, dan 2021. Jumlah sample sebanyak 93 pemerintah kota di Indonesia.

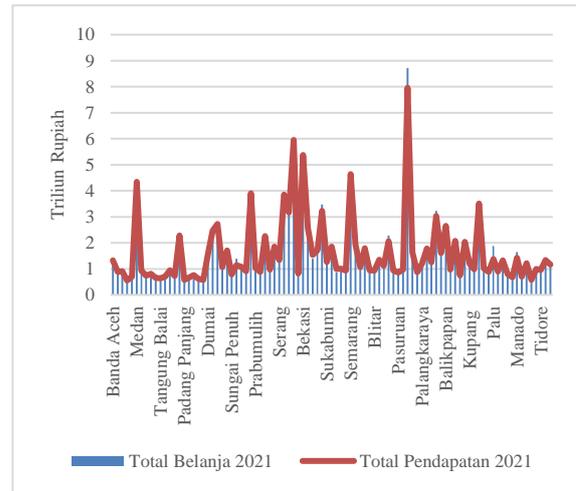
HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks kapasitas anggaran pemerintah kota di Indonesia pada masa pandemi covid 19 menunjukkan empat daerah yang memiliki indeks tertinggi. Pemerintah kota Mataram, Tidore, Batam, dan Sabang mendapatkan nilai indeks tertinggi secara nasional. Pemerintah kota tersebut memiliki ketangguhan kapasitas anggaran yang baik selama masa pandemi covid 19. Sedangkan, terdapat tiga pemerintah kota yang mendapatkan skor terendah. Pemerintah kota Bengkulu, Bontang, dan Tegal. Penilaian indeks kondisi keuangan dilakukan dengan tiga indikator yaitu solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Pada tabel 1, 2, dan 3 terdapat hasil penilaian indeks kapasitas anggaran pemerintah kota pada tahun 2020 dan 2021.

Indeks Solvabilitas Anggaran

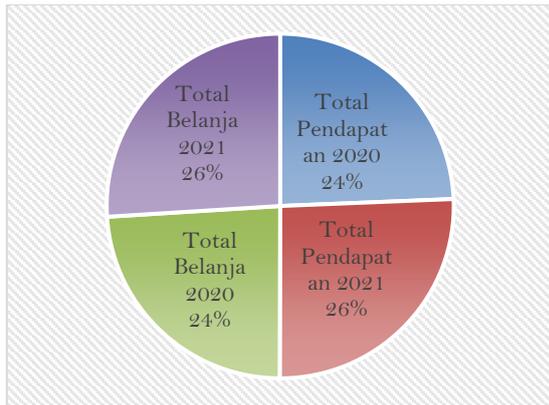
Solvabilitas anggaran adalah penilaian yang menunjukkan kemampuan daerah dalam menyeimbangkan jumlah pendapatan dan belanja dalam satu periode anggaran (Ritonga, 2015; Ritonga et al., 2019). Pemerintah kota dengan indeks solvabilitas anggaran tertinggi memiliki ketangguhan kapasitas anggaran dalam merealisasikan pendapatan dan belanja ditengah kondisi pandemi covid 19. Pemerintah kota Mataram dengan nilai indeks 0,64 pada 2021 dan 0,65 pada 2020 merupakan daerah dengan indeks solvabilitas anggaran tertinggi secara nasional. Pemerintah kota Mataram yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki realisasi total pendapatan 1,93 triliun Rupiah dan total belanja 1,45 triliun Rupiah pada tahun 2020. Pada tahun 2021 pemerintah kota Mataram mampu meningkatkan realisasi pendapatan menjadi 2,04 triliun Rupiah dan belanja 1,58 triliun Rupiah. Kota Mataram mampu meningkatkan realisasi pendapatan daerah yang cukup tinggi selama masa pandemi covid 19. Selain itu, pengelolaan belanja daerah bisa dilaksanakan secara lebih efisien dan optimal. Kondisi ini menjadi faktor utama bagi pemerintah kota Mataram mendapatkan indeks solvabilitas anggaran tertinggi secara nasional. Indeks solvabilitas anggaran terendah yaitu pemerintah kota Bengkulu dengan indeks 0,06 dan 0,05. Realisasi pendapatan kota Bengkulu pada tahun 2020 1,07 triliun rupiah dan 1,39 triliun pada 2021. Realisasi anggaran kota Bengkulu yaitu total belanja pada masa pandemi lebih tinggi dibandingkan total pendapatan sehingga menyebabkan rendahnya solvabilitas anggaran. Realisasi belanja mencapai 1,27 triliun rupiah dan 1,38 triliun rupiah.

Secara nasional indeks solvabilitas anggaran pemerintah kota berada pada rata-

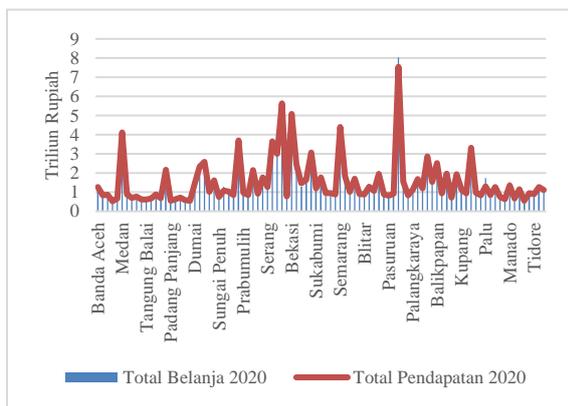


rata 0,31 dan 0,30. Pandemi covid 19 tidak memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan daerah untuk merealisasikan pendapatan dan belanja. Secara keseluruhan pemerintah kota di Indonesia mampu merealisasikan pendapatan sebesar 140 triliun Rupiah pada 2020 dan 147 triliun Rupiah pada 2021. Realisasi belanja pada tahun 2020 mencapai 137 triliun Rupiah dan 149 triliun Rupiah pada 2021. Proporsi total pendapatan dan belanja dimasa pandemi covid 19 meningkat 2 persen pada tahun 2021 menjadi 26 persen. Persentase tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pendapatan dan belanja pemerintah kota di Indonesia tidak terpengaruh oleh pandemi covid 19. Gambar 1 menunjukkan proporsi realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kota di Indonesia.

Gambar 1. Proporsi Total Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota di Indonesia Tahun 2020 dan 2021



Gambar 2. Realisasi Total Pendapatan dan Total Belanja Pemerintah Kota di Indonesia Tahun 2020 dan 2021



Indeks solvabilitas anggaran pemerintah kota berdasarkan klaster kepulauan menunjukkan hasil yang relatif stabil pada seluruh wilayah. Wilayah Sumatera dengan indeks solvabilitas anggaran tertinggi kota Solok dan Batam. Kota Bandung merupakan daerah dengan indeks solvabilitas anggaran tertinggi di pulau Jawa. Pada pulau Kalimantan indeks tertinggi diperoleh Kota Balikpapan. Kota Bima merupakan daerah dengan indeks solvabilitas anggaran tertinggi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kota Makassar untuk wilayah Sulawesi, Kota Tual untuk wilayah Maluku, dan Kota Sorong untuk wilayah Papua. Sebaliknya, indeks terendah pada wilayah Sumatera diperoleh Kota Bengkulu. Pada wilayah Jawa indeks terendah diperoleh Kota Depok dan

Salatiga. Kota Tarakan dan Singkawang mendapatkan nilai indeks terendah di wilayah Kalimantan. Kota Bima memperoleh indeks solvabilitas anggaran terendah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi indeks terendah diperoleh Kota Palu. Kota ternate dan Kota Sorong memperoleh indeks terendah di wilayah Maluku dan Papua. Hasil perhitungan indeks solvabilitas anggaran berdasarkan klaster kepulauan terdapat pada tabel 1.

Tabel 1. Indeks Solvabilitas Anggaran

Klaster Kepulauan		2021	2020
Sumatera	Indeks Tertinggi	Solok (0,46)	Batam (0,49)
	Indeks Terendah	Bengkulu (0,06)	Bengkulu (0,05)
	Indeks	Bandung (0,60)	Bandung (0,62)
Jawa	Indeks Tertinggi	Depok (0,23)	Salatiga (0,23)
	Indeks Terendah	Balikpapan (0,56)	Balikpapan (0,61)
	Indeks	Tarakan (0,18)	Singkawang (0,18)
Kalimantan	Indeks Tertinggi	Mataram (0,64)	Mataram (0,65)
	Indeks Terendah	Bima (0,10)	Bima (0,08)
	Indeks	Makassar (0,48)	Makassar (0,47)
Sulawesi	Indeks Tertinggi	Palu (0,14)	Palu (0,13)
	Indeks Terendah	Tual (0,41)	Tual (0,29)
	Indeks	Ternate (0,25)	Ternate (0,18)
Maluku	Indeks Tertinggi	Jayapura (0,45)	Jayapura (0,43)
	Indeks Terendah	Sorong (0,32)	Sorong (0,31)
	Indeks		

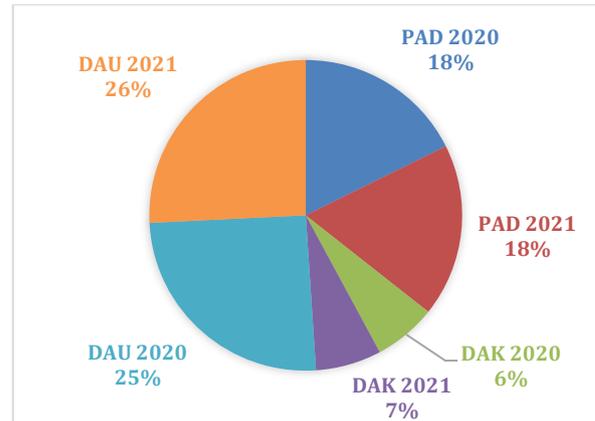
(Sumber: Hasil perhitungan, 2022)

Indeks Kemandirian Keuangan

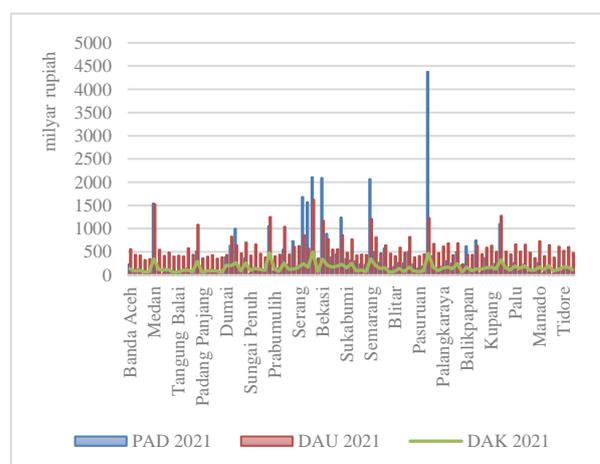
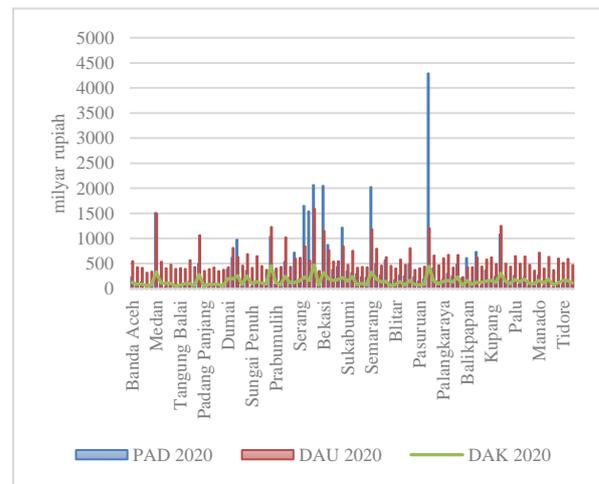
Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator yang menunjukkan kekuatan anggaran untuk tidak rentan terhadap sumber pendanaan dari luar. Hasil perhitungan kemandirian keuangan pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan pemerintah kota Tidore, kota Batam, dan kota Magelang memperoleh nilai indeks tertinggi secara nasional. Nilai indeks

kemandirian keuangan kota Tidore dan Batam yaitu 0,56, sedangkan kota Magelang memiliki skor 0,55. Pemerintah kota Bontang memperoleh indeks kemandirian keuangan terendah dimasa pandemi covid 19 dengan nilai 0,12 pada tahun 2020. Secara nasional indeks kemandirian keuangan pemerintah kota pada masa pandemi covid 19 adalah 0,35 (2020) dan 0,41 (2021). Tingkat kemandirian keuangan pemerintah kota di Indonesia masih bergantung dengan pendapatan dana transfer pemerintah pusat. Hal ini terlihat pada gambar 4 realisasi pendapatan DAU dan DAK masih memiliki proporsi terbesar dibandingkan dengan realisasi PAD. Total realisasi DAU pada tahun 2020 mencapai 54 triliun Rupiah dan 55 triliun Rupiah pada 2021. Total realisasi DAK mencapai 13,8 triliun Rupiah dan 14,5 triliun Rupiah. Sedangkan, realisasi PAD pada tahun 2020 37,7 triliun Rupiah dan 38,4 triliun Rupiah. Pada gambar 3 PAD memiliki proporsi yang kecil sehingga perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan.

Gambar 3. Proporsi Realisasi PAD, DAU, dan DAK tahun 2020 dan 2021



Gambar 4. Realisasi PAD, DAU, dan DAK Pemerintah Kota di Indonesia Tahun 2020 dan 2021



Indeks kemandirian keuangan pemerintah kota berdasarkan klaster kepulauan menunjukkan hasil yang relatif

stabil pada wilayah Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kota Batam, Surabaya, Cilegon, Banjarbaru, Palangkaraya, Denpasar, Palopo, Gorontalo, Tidore, dan Jayapura merupakan pemerintah kota dengan indeks kemandirian keuangan tertinggi pada klaster kepulauan. Sedangkan, kota Bukittinggi, Prabumulih, Batu Malang, Bontang, Bima, Palu, Ternate, dan Sorong memperoleh nilai terendah pada indeks kemandirian keuangan pada masa pandemi covid 19. Pada tabel 2 terdapat rincian indeks kemandirian keuangan berdasarkan klaster kepulauan.

Tabel 2. Indeks Kemandirian Keuangan

Klaster Kepulauan		2021	2020
Sumatera	Indeks Tertinggi	Batam (0,56)	Batam (0,51)
	Indeks Terendah	Bukit Tinggi (0,18)	Prabumulih (0,26)
Jawa	Indeks Tertinggi	Surabaya (0,52)	Cilegon (0,55)
	Indeks Terendah	Batu Malang (0,16)	Batu Malang (0,29)
Kalimantan	Indeks Tertinggi	Banjarbaru (0,37)	Palangkaraya (0,42)
	Indeks Terendah	Bontang (0,12)	Bontang (0,10)
Bali dan Nusa Tenggara	Indeks Tertinggi	Denpasar (0,39)	Denpasar (0,45)
	Indeks Terendah	Bima (0,10)	Bima (0,37)
Sulawesi	Indeks Tertinggi	Palopo (0,50)	Gorontalo (0,52)
	Indeks Terendah	Palu (0,30)	Palu (0,33)
Maluku	Indeks Tertinggi	Tidore (0,56)	Tidore (0,51)
	Indeks Terendah	Ternate (0,25)	Ternate (0,37)
Papua	Indeks Tertinggi	Jayapura (0,42)	Jayapura (0,42)
	Indeks Terendah	Sorong (0,26)	Sorong (0,27)

(Sumber: Hasil perhitungan, 2022)

Indeks Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Indeks solvabilitas layanan tertinggi pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh kota Sabang

dengan nilai 1,00. Indeks solvabilitas layanan terendah pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh kota tegal dengan nilai 0,01. Secara nasional indeks solvabilitas layanan pemerintah kota pada masa pandemi covid stabil pada 0,22. Indeks solvabilitas layanan pemerintah kota berdasarkan klaster kepulauan menunjukkan hasil yang stabil pada seluruh wilayah. Pemerintah kota Sabang, Mojokerto, Bontang, Mataram, Pare Pare, Ternate, dan Sorong memperoleh indeks solvabilitas layanan tertinggi pada masing-masing wilayah. Sedangkan, kota Medan, Magelang, Banjarmasin, Bima, Makassar, Ambon, dan Jayapura mendapatkan nilai indeks solvabilitas layanan terendah pada masing-masing wilayah. Hasil perhitungan indeks solvabilitas layanan berdasarkan klaster kepulauan terdapat pada tabel 3.

Tabel 3. Indeks Solvabilitas Layanan

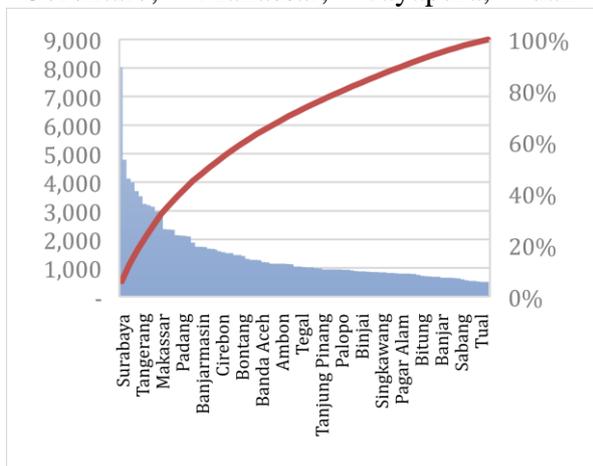
Klaster Kepulauan		2021	2020
Sumatera	Indeks Tertinggi	Sabang (1,00)	Sabang (1,00)
	Indeks Terendah	Medan (0,08)	Medan (0,08)
Jawa	Indeks Tertinggi	Mojokerto (0,38)	Mojokerto (0,38)
	Indeks Terendah	Magelang (0,01)	Magelang (0,01)
Kalimantan	Indeks Tertinggi	Bontang (0,38)	Bontang (0,38)
	Indeks Terendah	Banjarmasin (0,11)	Banjarmasin (0,11)
Bali dan Nusa Tenggara	Indeks Tertinggi	Mataram (0,16)	Mataram (0,16)
	Indeks Terendah	Bima (0,05)	Bima (0,05)
Sulawesi	Indeks Tertinggi	Pare Pare (0,33)	Pare Pare (0,33)
	Indeks Terendah	Makassar (0,11)	Makassar (0,11)
Maluku	Indeks Tertinggi	Ternate (0,64)	Ternate (0,64)
	Indeks Terendah	Ambon (0,09)	Ambon (0,09)
Papua	Indeks Tertinggi	Sorong (0,21)	Sorong (0,21)
	Indeks Terendah	Jayapura (0,19)	Jayapura (0,19)

(Sumber: Hasil perhitungan, 2022)

Indeks solvabilitas layanan pemerintah kota di Indonesia cukup stabil

jika dihadapkan dengan pandemi covid 19. Solvabilitas layanan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk suatu daerah. Pemerintah kota dengan jumlah penduduk kecil akan memiliki indeks yang tinggi. Selain itu, dengan jumlah penduduk yang kecil berbanding lurus dengan jumlah kasus covid yang rendah. Sebaliknya, pemerintah kota dengan jumlah penduduk yang besar memiliki jumlah kasus covid yang tinggi. Kondisi ini berbanding lurus dengan nilai indeks solvabilitas anggaran yang rendah. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan indeks yang menunjukkan bahwa pemerintah kota Sabang, Mojokerto, Bontang, Mataram, Pare Pare, Ternate, dan Sorong memiliki nilai indeks tertinggi.

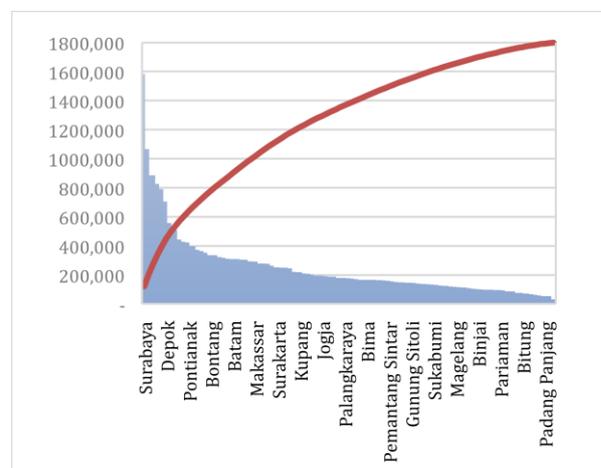
Penyebaran virus covid 19 sangat dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat. Pemerintah kota dengan jumlah penduduk yang besar, ekonomi daerah yang besar, menyebabkan mobilitas masyarakat yang tinggi. Penyebaran virus covid 19 di Indonesia terjadi begitu cepat pada wilayah dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Kasus terkonfirmasi covid 19 dengan jumlah melebihi 30 ribu kasus terjadi pada Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Lampung, Tangerang, Tangerang Selatan, Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, Semarang, Surakarta, Jogja, Balikpapan, Denpasar, Gorontalo, Makassar, Jayapura, dan



Sorong. Jumlah kasus covid 19 mempengaruhi kondisi kapasitas anggaran daerah, hal ini menyebabkan penurunan ekonomi. Pemberlakuan aturan PSBB level 1 untuk mengurangi penyebaran virus berpengaruh terhadap penurunan kondisi ekonomi daerah.

Pemerintah kota dengan tingkat ekonomi yang besar mempengaruhi tingkat realisasi belanja daerah ketika menghadapi pandemi. Pada gambar 5 realisasi belanja operasional terbesar dilakukan oleh kota Surabaya, Semarang, Palembang, Bandung, Tangerang Selatan, Makassar, dan Batam. Pada gambar 6 realisasi belanja modal tertinggi dilakukan oleh kota Surabaya, Palembang, Bekasi, Bandung, Jambi, Pontianak, Banjarmasin, dan Bengkulu. Pada masa pandemi covid 19 realisasi belanja daerah tidak terpengaruh, pemerintah kota dengan tingkat APBD yang tinggi dan jumlah kasus yang besar tetap melaksanakan program kerja dengan baik. Pemerintah kota dengan tingkat realisasi belanja tinggi justru berbanding lurus dengan besaran kasus covid 19 yang terkonfirmasi di wilayahnya.

Gambar 5. Realisasi Belanja Operasional (triliyun Rupiah) Pemerintah Kota di Indonesia



Gambar 6. Realisasi Belanja Modal (milyar Rupiah) Pemerintah Kota di Indonesia

KESIMPULAN

Kapasitas anggaran pemerintah kota menjadi faktor penting dalam penanggulangan kasus covid 19 di Indonesia. Strategi dan upaya penanganan covid 19 seperti vaksinasi massal, penambahan fasilitas kesehatan, dan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh pemerintah selama pandemi covid 19. Pandemi covid 19 membawa dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat hingga ekonomi daerah. Penilaian kapasitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah kota dalam mempertahankan kondisi APBD ditengah terjadinya kondisi tidak terduga. Penilaian indeks kapasitas anggaran menunjukkan bahwa kota Mataram, Tidore, Batam, dan Sabang sebagai kota dengan indeks tertinggi. Sedangkan, pemerintah kota Bengkulu, Bontang, dan Tegal memperoleh nilai indeks terendah. Pemerintah kota dengan nilai indeks tertinggi memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan APBD sehingga dapat merealisasikan strategi penganggulangan pandemi covid 19 secara lebih optimal. Pemerintah kota dengan nilai indeks terendah memerlukan optimalisasi pengelolaan APBD dimasa depan ketika menghadapi kondisi tidak terduga.

SARAN

Realisasi pendapatan dan belanja daerah dimasa pandemi covid 19 tidak terlalu terpengaruh. Pemerintah kota tetap bisa menjaga jumlah realisasi anggaran hingga mampu meningkatkan kapasitas anggarannya ditengah pandemi. Pemerintah kota dengan tingkat perekonomian terbesar di Indonesia tetap mampu menjaga realisasi APBD. Namun, pemerintah kota dengan kapasitas anggaran yang rendah dan sangat bergantung pada pendapatan dana transfer pemerintah pusat,

perlu melakukan optimalisasi sistem pengelolaan keuangan khususnya ketika menghadapi kejadian tidak terduga. Penelitian selanjutnya dapat menilai ketahanan kapasitas anggaran dengan indikator solvabilitas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Barbera, C., Jones, M., Korac, S., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2021). Local government strategies in the face of shocks and crises: the role of anticipatory capacities and financial vulnerability. *International Review of Administrative Sciences*, 87(1), 154–170.
<https://doi.org/10.1177/0020852319842661>
- Blackman, A., María Ibáñez, A., Izquierdo, A., Keefer, P., Moreira, M. M., Schady, N., & Serebrisky, T. (2020). *Public Policy to Tackle Covid-19: Recommendations for Latin America and the Caribbean*. 46.
<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Public-Policy-to-Tackle-Covid-19-Recommendations-for-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf>
- De Villiers, C., Cerbone, D., & Van Zijl, W. (2020). The South African government's response to COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 797–811.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0120>
- DeWit, A., Shaw, R., & Djalante, R. (2020). An integrated approach to sustainable development, National Resilience, and COVID-19

- responses: The case of Japan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 51(August), 101808. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101808>
- Indriani, I. K. et al. (2022). The Effect Financial Condition on Covid 19 Case (Empirical Study on Local Government in West Kalimantan). *Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1394–1410. <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>.
- Indriani, I. K. (2022a). Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19 Oleh: Ika Kurnia Indriani (Prodi Diploma IV Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak). *Neraca, Jurnal Pendidikan, Jurnal Ekonomi, Ilmu Volume, Akuntansi*, 6(2), 156–168. <https://doi.org/10.31851/neraca.v6i2.9307>.
- Indriani, I. K. (2022b). The Effect Of Local Government Budget Capacity On Covid-19 Cases Handling : Study In District Government Of Kalimantan Island (Projection In Facing Pandemic) Jurusan Akuntansi , Politeknik Negeri Pontianak , Jalan Ahmad Yani Pontianak , Indonesia THE EF. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 37–54. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2292>.
- Indriani, I. K., Lestari, M. P., & Triani, M. (2019). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten di Kalimantan. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 159–173. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/7675/2970>.
- Kober, R., & Thambar, P. J. (2021). Coping with COVID-19: the role of accounting in shaping charities' financial resilience. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 34(6), 1416–1429. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-09-2020-4919>.
- Kurnia Indriani, I. (2021). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Di Indonesia (Proyeksi Dalam Menghadapi Covid 19). *ISAS*, 9(1), 371–389.
- Langton, S., Dixon, A., & Farrell, G. (2021). Six months in: pandemic crime trends in England and Wales. *Crime Science*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s40163-021-00142-z>.
- Ritonga, I. T. (2015). Developing a Measure of Local Government'S Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142–164. <https://doi.org/10.22146/jieb.6206>.
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2019). Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 1–25. <https://doi.org/10.18196/jai.2002114>.
- Susantono, B., Sawada, Y., & Park, C.-Y. (2020). *Navigating COVID-19 in Asia and the Pacific* (Issue



September).